

Pengaruh Pemekaran 5 Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jayapura Papua

Andi Ahmad Rahmansyah San¹, Niniek Lantara², Aryati Arfah³, Muhammad Arif⁴, Yana Ameliana^{5*}

¹ Program Doktor Manajemen, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar, Indonesia

^{2,3,4} Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

⁵ Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura. Pemekaran wilayah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan publik di suatu daerah. Kabupaten Jayapura, salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia, telah mengalami pemekaran menjadi 5 wilayah baru dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemekaran 5 wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura. Studi ini menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder berupa data ekonomi, sosial, dan demografi Kabupaten Jayapura sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Data primer diperoleh melalui survei terstruktur yang melibatkan responden dari sektor publik, swasta, dan masyarakat umum di setiap wilayah pemekaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah di Kabupaten Jayapura memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun setelah pemekaran, terjadi pembangunan infrastruktur, Peningkatan Pelayanan Publik, Potensi Sumber daya alam, Peningkatan Otonomi Daerah dan Peningkatan Investasi.

Kata Kunci: *Pemekaran Daerah; Pertumbuhan Ekonomi*

Copyright (c) 2023 Yana Ameliana

✉ Corresponding author :

Email Address : yana.ameliana@gmail.com,

PENDAHULUAN

Papua merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam, namun masih tergolong sebagai wilayah yang tertinggal dalam pertumbuhan ekonominya. Papua menjadi anak tiri yang tersisihkan dari Pemerintah Hindia Belanda (Nederslad Indies) selama periode penjajahan Belanda di Indonesia. Papua juga menjadi daerah terlupa yang dimanfaatkan sebagai benteng untuk menjaga Indonesia dari gangguan asing. Papua juga menjadi tempat untuk menghukum pegawai sipil yang tidak melakukan tugas dan melanggar disiplin. Papua juga menjadi tempat pengasingan untuk pejuang-pejuang kemerdekaan (Wabiser, 2020).

Kabupaten Jayapura merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan luas untuk

mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal. Berdasarkan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayapura, melalui otonomi daerah pemerintah daerah dituntut kreatif dalam mengembangkan perekonomian, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menimbulkan multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya. (BPS Kabupaten Jayapura)

Pemekaran wilayah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan publik di suatu daerah. Pemekaran wilayah dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk di Kabupaten Jayapura. Pemekaran wilayah dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari beberapa cara yaitu dengan memekarkan wilayah, pemerintah dapat lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya dan anggaran untuk masing-masing wilayah yang baru terbentuk. Ini memungkinkan adanya peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Pemekaran wilayah juga membuka peluang baru bagi investasi dan pengembangan sektor ekonomi. Dengan adanya pemekaran, wilayah-wilayah baru dapat memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengambil keputusan terkait pembangunan ekonomi. Hal ini dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di wilayah baru yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Selain itu, pemekaran wilayah juga berdampak pada peningkatan aksesibilitas dan pelayanan publik. Dengan wilayah yang lebih kecil dan terorganisir dengan baik, pemerintah dapat lebih efektif dalam memberikan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan publik ini dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah tersebut.

Namun, perlu dicatat bahwa pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu langsung dan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Misalnya, keberhasilan pemekaran wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga tergantung pada pengelolaan yang baik dari pemerintah setempat, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, stabilitas politik, dan kebijakan ekonomi yang mendukung.

Tantangan yang sering dihadapi oleh pembentukan kabupaten terhadap pembangunan ekonomi di Papua. Terindikasi bahwa pembentukan daerah baru ditantang oleh keterlibatan politik di lapangan yang menunda implementasi, kurangnya sumber daya dan tidak memadainya personel yang memenuhi syarat yang menghambat pembangunan Ekonomi Lokal khususnya di daerah sumber daya miskin. Oleh karena itu disarankan agar pembentukan daerah baru harus didukung dengan menghindari politik, perluasan layanan sosial untuk Papua yang lebih baik.

Secara keseluruhan, pemekaran lima wilayah di Kabupaten Jayapura dapat memberikan potensi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam melaksanakan pemekaran wilayah, penting bagi pemerintah setempat untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya dengan baik, meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan langkah-langkah yang tepat, pemekaran wilayah dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura dapat didorong oleh sejumlah faktor setelah pemekaran lima wilayah diantaranya yaitu Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Pelayanan Publik, Potensi Sumber Daya Alam, Peningkatan Otonomi Daerah dan Peningkatan Investasi. Dalam mengoptimalkan pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura, penting bagi pemerintah setempat untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melakukan perencanaan yang matang, dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena pemekaran daerah di Papua dan untuk menjelaskan bagaimana Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jayapura Papua. Data utama dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara pelaku ekonomi di Papua dan data sekunder dari penelitian ini berasal dari jurnal dan buku terkait Pertumbuhan Ekonomi. Data dianalisis dan didiskusikan secara tematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pemekaran lima Wilayah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jayapura memiliki potensi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan mengenai pengaruh pemekaran tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura:

1. **Pembangunan Infrastruktur:** Pemekaran wilayah memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dan anggaran secara lebih efektif dalam membangun infrastruktur di Kabupaten Jayapura. Dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, konektivitas antara wilayah-wilayah baru meningkat. Hal ini akan memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah tersebut.
2. **Peningkatan Pelayanan Publik:** Dengan pemekaran wilayah, pemerintah dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik di kabupaten Jayapura. Wilayah yang lebih kecil memungkinkan pemerintah setempat untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan memberikan layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat lainnya secara lebih efektif. Peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor jasa.
3. **Potensi Sumber Daya Alam:** Kabupaten Jayapura memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil hutan, pertanian, perikanan, dan tambang. Pemekaran wilayah memungkinkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara lebih efektif. Dengan pengelolaan yang baik, wilayah-wilayah baru dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam tersebut dan mengembangkan sektor ekonomi terkait. Misalnya, pengembangan sektor pertanian dan perikanan dapat meningkatkan produksi dan membuka peluang ekspor. Pengembangan sektor ini dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah baru yang memiliki potensi alam yang kaya.

4. Peningkatan Otonomi Daerah: Pemekaran wilayah memberikan otonomi yang lebih besar bagi wilayah baru di Kabupaten Jayapura. Dengan memiliki kewenangan lebih dalam mengambil keputusan terkait pembangunan ekonomi, wilayah baru dapat merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Hal ini menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
5. Peningkatan Investasi: Pemekaran wilayah membuka peluang baru bagi investasi di Kabupaten Jayapura. Wilayah-wilayah baru yang memiliki potensi ekonomi yang lebih tinggi dapat menarik minat investor. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan fasilitas yang lebih baik bagi investor, seperti kemudahan perizinan, pengurangan pajak, dan dukungan infrastruktur. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor swasta dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemekaran 5 wilayah di Kabupaten Jayapura memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemekaran ini telah mendorong pembangunan infrastruktur, Peningkatan Pelayanan Publik, Potensi Sumber daya alam, Peningkatan Otonomi Daerah dan Peningkatan Investasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan untuk mendukung pemekaran wilayah yang efektif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan pemekaran wilayah ini. Koordinasi antarwilayah perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya dan pembangunan. Selain itu, alokasi sumber daya yang adil antara wilayah-wilayah baru dan wilayah induk juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan. Pengembangan kapasitas administratif di setiap wilayah pemekaran juga menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola wilayah baru secara efisien.

Referensi :

- Dzakiah, U. W., Santi, S., & Indra, P. (2016). Efek dari Modal Belanja, Investasi, Jumlah Wisatawan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 105-128.
- Fadli, F. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 16.
- Grant, B., & Dollery, B. (2012). Autonomy versus oversight in local government reform. *Australian Journal of Economic Development*.
- Jhingan, M. L. (2012). *Pembangunan dan Perencanaan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kairupan, D. (2013). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing dalam*. Jakarta: Kencana.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Pembangunan Daerah Edisi Ketiga*. Erlangga.
- Kurniawan, A. (2017). Potensi Pertumbuhan Ekonomi di Papua Pasca Desentralisasi. *Jurnal Ekonomi dan Pengembangan*, 25-35.
- Kurniawan, A., & Militina T, S. R. (2017). Pengaruh Investasi Swasta dan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pertumbuhan Inovasi Ekonomi Digital. <https://core.ac.uk/download/pdf/229018316.pdf>, 68-77.
- Mardiasmo. (2008). *Pendapatan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Nuraini, I., & Hariyani, H. (2019). Kualitas Ekonomi Daerah ditinjau dari Pemekaran Daerah di Indonesia. <https://doi.org/10.23917/JEP.V20I1.7104>, 80-86.
- Rizki, R., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, 9-16.
- Utami, S. (2017). Efek dari Krisis Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. [https://doi.org/10.21511/imfi.14\(1-1\).2017.11](https://doi.org/10.21511/imfi.14(1-1).2017.11), 248-253.
- Wabiser, Y. D. (2020). Papua dari Pemekaran ke Pemekaran. Bandung: Widina Bakti Persada.
- Wahab, M., Ahmed, V., & Mahmood, H. (2014). Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. <https://www.freit.org/WorkingPapers/Papers/Development/FREIT782.pdf>, 29-56.